

KEGIATAN DPR-RI AKHIR JULI-AWAL AGUSTUS 2012

Kegiatan DPR pada akhir Juli ini telah memasuki Masa Reses Masa Persidangan IV 2011-2012, tepatnya sejak Pidato Penutupan tanggal 13 Juli yang lalu. Masa Persidangan I tahun 2012-2013 baru akan dimulai pada 16 Agustus 2012 yang akan datang. Meskipun Masa Reses, pada akhir Juli-awal Agustus ini, Dewan tetap fokus pada kegiatan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, utamanya dalam melakukan kunjungan ke daerah (Kunker). Berikut ini ringkasan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan kegiatan *parliamentary diplomacy* oleh DPR minggu ini.

Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam rangkuman minggu yang lalu, telah disampaikan mengenai disetujuinya RUU tentang Pendidikan Tinggi untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna tanggal 13 Juli lalu. RUU ini telah mengundang sekelompok masyarakat dan dunia akademis, memberikan resistensi dan penolakan beberapa pasal, bahkan akan mengajukannya ke MK. Dalam laporannya, oleh Ketua Komisi X kepada Rapat Paripurna, dikatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa RUU ini perlu segera menjadi UU. Antara lain adalah bentuk tanggungjawab negara atas pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi yang harus berpihak kepada masyarakat, serta harus mampu menjawab semua permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan pendidikan selama ini.

Pokok-pokok pengaturan dalam RUU Pendidikan Tinggi adalah untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang bermutu dan terjangkau, pemerataan akses Pendidikan Tinggi, relevansi penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dengan dunia kerja dan industri yang berpihak kepada mahasiswa dan hal-hal lain yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di Indonesia.

Pendapat akhir Presiden RI atas RUU Pendidikan Tinggi yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh dijelaskan mengenai dukungan dan persetujuan pemerintah terhadap seluruh substansi yang tertuang didalam RUU ini. Menteri menyampaikan bahwa pembahasan RUU ini telah dilakukan secara demokratis untuk menentukan rumusan yang terbaik dan sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, agar terhindar dari rumusan yang dapat merugikan hak konstitu-

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie



sional seseorang atau masyarakat yang berakibat pada permohonan Yudisial Review di kemudian hari. Pengaturan berbagai aspek Pendidikan Tinggi telah secara komprehensif disepakati antara DPR dan Pemerintah dengan memperhatikan masukan dari berbagai kalangan.

RUU Pendidikan Tinggi telah sangat ketat memastikan tidak terjadinya komersialisasi dan liberalisasi Pendidikan Tinggi dengan mengharuskan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berprinsip nirlaba; memastikan tanggungjawab dan pendanaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah pada Perguruan Tinggi; mendorong dunia usaha; dunia industri dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendanai Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Tinggi merupakan tulang punggung bagi terciptanya masyarakat berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based society*) untuk mampu memenangi persaingan dalam perekonomian dunia yang makin bergeser pada basis ilmu pengetahuan. Untuk mempercepat dan mendorong pembangunan bangsa, diperlukan anak bangsa yang cerdas komprehensif. RUU ini juga meletakkan harapan pada Perguruan Tinggi untuk menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, membudayakan dan memberdayakan bangsa dari Sabang sampai Merauke berdasar Pancasila dan UUD 1945.

Untuk dapat menghasilkan itu semua, diperlukan Perguruan Tinggi yang bermutu. Salah satu syarat untuk mempercepat kemajuan Perguruan Tinggi adalah pemberian **otonomi yang luas** disertai akuntabilitas, baik otonomi dalam bidang akademik maupun dalam bidang tata kelola.

RUU Pendidikan Tinggi juga memberi fleksibilitas bagi keragaman Perguruan Tinggi di Indonesia dengan menawar-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

kan berbagai bentuk tata kelola Perguruan Tinggi sesuai dengan kondisi dan kematangan institusi Perguruan Tinggi. Selain itu, RUU ini sangat menghargai dan memberi tempat yang luas bagi peranserta masyarakat dalam menyediakan Pendidikan Tinggi. Peran yayasan dan lembaga nirlaba lainnya untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa, diberi keleluasaan untuk mengembangkan tata kelola sesuai dengan keragaman budaya organisasi masing-masing Perguruan Tinggi.

RUU lainnya yang hampir selesai, tetapi karena ada beberapa pasal yang masih perlu didalami lebih lanjut, adalah RUU tentang Pangan. RUU tentang Pangan dimaksudkan untuk menggantikan UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan yang masih bersifat umum dan sangat menitik beratkan pada sektor industri pangan sehingga dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala dalam hal penegakan hukum, menyangkut penerapan sanksi yang relatif rendah dan tidak sesuai lagi dengan Era Otonomi Daerah serta perkembangan di masyarakat sehingga perlu diganti dengan RUU baru.

Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945, sebagai komponen dasar untuk mewujudkan SDM yang berkualitas. Bahwa berdasarkan UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Economic Social and Culture Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi dan Budaya), pangan merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. RUU ini terdiri dari 16 bab dan 146 pasal. Diharapkan dalam Masa Sidang I tahun 2012-2013, RUU ini dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Di dalam Masa sidang IV sebagaimana dirangkum ming-

gu lalu, DPR telah melakukan kegiatan di bidang anggaran yaitu pembahasan dalam tingkat Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2013 yang akan menjadi dasar bagi pemerintah di dalam pengajuan RUU APBN 2013 berikut Nota Keuangan dan Dokumen Pendukung yang kan disampaikan Presiden pada Rapat Paripurna tanggal 16 Agustus. Disamping itu, dalam Masa Sidang IV, DPR juga telah membahas RUU tentang Pertanggungjawaban Atas APBN 2011.

Didalam Tata Tertib DPR Pasal 158 Poin 6 diatur bahwa pembahasan dan penetapan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah oleh BPK ke DPR.

Sesuai dengan agenda DPR, RUU ini akan diselesaikan dalam Pembicaraan Tingkat II pada 28 Agustus 2012.

RUU Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2011 merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” (WDP) atau *qualified opinion* atas LKPP tahun 2011. Opini LKPP tahun 2011 masih sama dengan opini LPKK tahun 2010, namun terdapat peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan menurunnya permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP tahun 2011. Pemerintah mengatakan bahwa hal ini mencerminkan adanya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas LKPP. Pada LKPP tahun 2010, terdapat 4 permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP tahun 2010, yaitu terkait penerimaan perpajakan. Sedangkan pada LKPP tahun 2011, terdapat 2 permasalahan yang menyebabkan pengecualian atas kewajaran LKPP tahun 2011 yaitu: [1] adanya permasalahan dalam pelaksanaan dan pencatatan hasil inventarisasi dan penilaian aset tetap (IP) dan [2]



Sidang Penutupan Rapat Paripurna Ke-35 Masa Sidang IV

terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan dan penilaian terhadap aset eks-Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Diplomasi Parlemen

Presiden ASEAN-Inter Parliamentary Assembly (AIPA) Dr Marzuki Alie akan memenuhi undangan Ketua Parlemen Lok Sabha India Smt Meira Kumar untuk berkunjung ke India dalam kerangka hubungan antara AIPA dengan India. Kunjungan akan dilakukan pada 29 Juli hingga 3 Agustus 2012. Delegasi AIPA yang dipimpin oleh Dr Marzuki Alie terdiri dari KH Surahman Hidayat (Ketua BKSAP DPR RI), Sidharto Danusubroto (Wakil Ketua BKSAP DPR RI), anggota parlemen Singapura, Seng Han Thong, anggota parlemen Thailand Colonel Winai Sompong, dan anggota parlemen Vietnam Ngo Duc Manh.

Dalam kunjungannya, Delegasi AIPA akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Lok Sabha, Meira Kumar; Pimpinan Partai Oposisi di Lok Sabha dan juga Menteri Urusan Parlemen dan Sumber Daya Air. Selain itu, oleh pihak parlemen India, delegasi AIPA juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat penting di India. Kunjungan tersebut menandai juga komprehensifnya hubungan ASEAN dengan India yang berlangsung dalam kerangka *dialogue partnership* yang saat ini telah memasuki tahun ke-20. Presiden AIPA mengharapkan kerja sama antarpemerintah dalam hal ini AIPA dengan Parlemen India dapat dilakukan dalam cara-cara yang lebih konkret dan efektif untuk memperkuat hubungan dialog keduanya.

Selain itu, AIPA juga merencanakan untuk mengkampanyekan pentingnya negara-negara di dunia, termasuk India untuk meratifikasi CTBT. Dengan ratifikasi CTBT, komitmen nyata akan dunia yang bebas nuklir semakin kuat. Negara-negara di ASEAN sendiri telah meratifikasi CTBT, bahkan, Indonesia yang tergolong negara annex II (berpotensi membuat nuklir) telah meratifikasinya pada beberapa waktu yang lalu. AIPA juga mengharapkan agar kerja sama ekonomi, investasi dan perdagangan kedua entitas tersebut dapat semakin meningkat. Saat ini, ASEAN dan India telah memiliki perjanjian bebas terkait barang (*FTA Trade in Goods*) sementara *Trade in Services (TIS)* dan *Investment Agreement* sedang dalam proses negosiasi.

Presiden AIPA mengharapkan agar proses negosiasi tersebut dapat menghasilkan kesepakatan yang komprehensif, saling menguntungkan, seimbang, dan dalam situasi dua arah diskusi.

Selain itu, AIPA juga akan menyampaikan harapannya agar India dan ASEAN dapat memiliki konektivitas konkret dalam hal infrastruktur transportasi dan transportasinya. Pada kesempatan pertemuan, Presiden AIPA mengimbau India untuk mendorong maskapai penerbangan untuk mengeksplorasi kemungkinan *direct flight* dari India ke ASEAN vice versa. Sejumlah kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan India terkait *direct flight* ini telah disepakati di level eksekutif, sehingga perlu ada tindak lanjut bisnis dari hal tersebut. Dengan adanya *direct flight*, hubungan *people-to-people* ASEAN dan India akan semakin meningkat. Ini juga

akan mendorong dan mempermudah kerja sama ekonomi, perdagangan dan investasi antara keduanya. Arus turisme dari dan ke ASEAN – India juga akan semakin meningkat.

Selain kegiatan kunjungan ke India, kegiatan diplomasi parlemen minggu ini adalah kunjungan panitia International Committee of 2nd World Eco-Safety Conference 2012 (WESA) yang akan diselenggarakan di Bali bulan Desember 2012 ini. Ketua DPR mendukung acara tersebut saat menerima audiensi dengan Prof. Jiang Ming Jun (President International Eco-Safety Cooperative Organization/IESCO), Dr. Tee Chig Seng (General Secretary IESCO), Sukmawati Soekarnoputri (Ketua Dewan Pembina The Sukarno Center), dan Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna MWS (Rektor Universitas Mahendradatta Bali), Senin 23 Juli 2012.

Menurut Presiden IESCO Jiang Min Jun, World Eco-Safety Conference dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa, krisis ekologi di seluruh dunia telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan pembangunan. Oleh karena itu, untuk menjaga keselamatan lingkungan, mengurangi bencana alam, antisipasi terhadap krisis dan bencana ekologi yang tak terduga, merupakan hal yang penting. Ada banyak masalah ekologi yang terjadi saat ini, seperti pemanasan global, desertifikasi, polusi air, penggundulan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, makanan yang tidak aman, keamanan pangan dan keamanan energi, dll. Untuk itu diperlukan cara agar mengekang menipisnya sumber daya, menyeimbangkan pembangunan sosial-ekonomi dan konservasi ekologi bagi generasi sekarang dan masa depan, dan bagaimana memperkuat kemitraan antara negara maju dan berkembang.

PAW

Selasa, 24 Juli 2012, Ketua DPR melantik anggota Dewan Penganti Antar Waktu dari Fraksi Partai Demokrat atas nama Drs. Sofyan Ali, MM dari Daerah Pemilihan Jambi menggantikan As'ad Syam.*



Pelantikan Anggota PAW

Ketua DPR dan Presiden SBY Singgung Soal Kedelai

Aksi mogok produksi pengusaha tempe karena melonjaknya harga kedelai menjadi perhatian Presiden SBY dan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Saat acara Buka Puasa Bersama pejabat negara di rumah dinas Ketua DPR, kompleks Widya Chandra, Jakarta Rabu (25/7) isu ini menjadi pembicaraan keduanya.

“Masalah tempe ini jadi pembicaraan kita, tadi saat ramah tamah buka puasa Pak Presiden membicarakannya secara informal,” kata Marzuki kepada wartawan usai acara tersebut.

Ia mengaku dapat memahami penjelasan pemerintah naiknya harga kedelai adalah buntut dari gagal panen petani kedelai di Amerika Serikat yang mencapai angka 30 persen. Kondisi ini mempengaruhi pasar kedelai internasional apalagi saat ini permintaan negara raksasa Cina terhadap komoditas ini sedang tinggi.

“Langkah pemerintah untuk menghapus bea masuk impor kedelai menjadi 0 persen diharapkan dapat menjadi solusi sementara sehingga dapat menekan kenaikan harga di dalam negeri,” lanjut politisi Partai Demokrat ini.



Kedelai impor dari Amerika



Presiden dan Wakil Presiden bersama para Pimpinan MPR dan DPR sesaat berbuka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR RI Marzuki Alie

Namun dia mengingatkan kebijakan bea masuk impor 0 persen itu hendaknya berlaku sementara untuk melindungi petani kedelai di tanah air. Ia juga mengimbau para pengusaha tempe di tanah air untuk kembali berproduksi, karena makanan khas ini banyak menjadi menu favorit keluarga Indonesia.

Wartawan sempat menanyakan apakah acara buka puasa bersama pejabat negara di rumah dinas Ketua DPR menyediakan menu tempe dan tahu. “Tidak ada, kita ganti menu yang lain saja. Maaf ya untuk wartawan yang doyan tempe,” papar Marzuki disambut tawa para jurnalis yang mengelilinginya. (iky) foto: iky

Keberadaan Imigran Gelap Menjadi Beban bagi Negara

Keberadaan imigran ilegal dan para pencari suaka yang hendak menuju Australia menjadi beban bagi pemerintah dan rakyat Indonesia, untuk itu pemerintah didesak segera mengkaji ulang perjanjian kerjasama antara pemerintah RI dengan pemerintah Australia, serta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan The International Organization for Migration (IOM) dua organisasi internasional yang bertanggungjawab terhadap persoalan imigran dan pengungsi.



Tim Kunker Komisi III DPR meninjau langsung ke Rumah Detensi Imigrasi di Tanjung Pinang. Kepri



Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani

Hal tersebut dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke prov. Kepulauan Riau, HM. Nasir Djamil (F-PKS) saat melakukan peninjauan ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Tanjung Pinang Kepri. Nasir menegaskan, perjanjian G to G

antara pemerintah Indonesia dan Australia perlu dikaji kembali terkait penanganan imigran gelap ini, mengingat lebih banyak merugikan pihak kita.

“Ketidakjelasan status dan waktu para imigran mengenai keberangkatan mereka ke negara ketiga membuat mereka menjadi stress dan ingin keluar dari rumah detensi ini, makanya baru-baru ini ada puluhan warga Rudenim yang kabur,” tambahnya.

Nasir menambahkan, dalam rapat kerja dengan Menkumham yang akan datang, Komisi III akan mengusulkan revisi perjanjian G to G dengan Australia terkait persoalan imigran gelap ini.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM prov. Kepri, Rudhy Chaidir memaparkan, 55 orang warga Afghanistan kabur dari Rudenim ini pada tanggal 16 Juli 2012 pukul 03.10 WIB dengan cara mematahkan besi-besi jeruji di lantai atas. “Mereka frustrasi karena terlalu lama berada di

sini,” jelasnya Rudhy.

Dengan keterbatasan aparat yang bertugas di Rudemin ini tidak mungkin bisa mengawasi setiap ruangan dengan maksimal. “Tidak jarang petugas kami mengalami luka-luka saat mencegah para imigran yang hendak kabur,” tambahnya.

Kepada tim Komisi III DPR RI, Rudhy meminta agar dapat dicarikan solusi bagi penanganan masalah imigran gelap ini, karena persoalan imigran ilegal ini tidak dapat diselesaikan di tingkat daerah, karena itu berhubungan dengan kebijakan pemerintah pusat dengan Pemerintah Australia.

Saat ini ada 336 imigran dari berbagai negara yang menghuni Rudenim Tanjung Pinang. Sebagian besar berasal dari Afghanistan, Myanmar dan Sri Lanka.

Anggota Komisi III Ahmad Yani (F-PPP) meminta pemerintah dapat bersikap lebih tegas terhadap Australia maupun UNHCR dan IOM mengingat keberadaan mereka sudah sangat membebani kita. “Negara harus tegas menyatakan bahwa kita tidak sanggup lagi menangani mereka, segera kembalikan ke negara ketiga atau ke negara asal,” tandas Yani.

Anggota Komisi III Edy Sadeli (F-PD) mengusulkan agar pemerintah membuat rumah detensi di ruang terbuka dan lebih luas.

“Saya lihat Rudemin ini terlalu sempit, pantas saja para penghuni menjadi stress dan ingin kabur,” kata Edy Sadeli.

Dia meminta pemerintah lebih tegas menangani imigran gelap ini. “Jangan sampai Negara kita menjadi tempat sampah terus,” tukas anggota DPR asal DKI Jakarta ini. (Rn.Tvp)

Komisi V DPR Desak Pemerintah Siapkan Infrastruktur Sambut Lebaran

Anggota Komisi V DPR Saleh Husin mendesak pemerintah mempersiapkan infrastruktur dalam rangka persiapan menyambut mudik Lebaran.

“Mudik ini kan sudah menjadi masalah rutin setiap tahun. Jangan sampai ini menjadi masalah seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemenhub harus menambah moda-moda transportasi yang ada. Menambah kapal, pesawat, atau jumlah gerbong di titik-titik arus mudik. Agar tidak ada tumpahan arus mudik yang tidak jadi berangkat. Ini tidak boleh terjadi lagi,” katanya di Gedung DPR, Kamis, 26/7).

Menurutnya, yang masih memprihatinkan antarlain penyeberangan laut. Jangan sampai ada kepadatan di pelabuhan transit. “Seperti di Merak-Bakuheni pasti akan terjadi kemacetan yang cukup panjang. Tentu harus disiapkan armadanya tidak kurang pada saat fix season. Jangan sampai ada kapal yang docking,”katanya.

Selain itu, Jalur mudik darat juga harus dibersihkan dari pasar tumpah.

Agar transportasi lancar dan tidak menimbulkan kemacetan yang berpotensi kecelakaan. “Dalam hal ini Kemenhub berkoordinasi dengan Kepolisian untuk mengantisipasi pasar-pasar tumpah yang muncul. Karena tahun-tahun sebelumnya bisa diprediksi. Ini harus diantisipasi sehingga arus lalulintasnya bisa diarahkan sehingga tidak ada arus antrean yang panjang,” kata Sekretaris F-Hanura DPR ini.

Dia menambahkan, yang utama yaitu berusaha angka kecelakaan. Keselamatan mudik menjadi tanggungjawab Kemenhub bersama Kepolisian. “Data yang kami dapat dari Kemenhub jumlah korban kecelakaan itu 80 persen itu menggunakan kendaraan roda dua. Ini harus bisa diantisipasi untuk bisa diatur pemberangkatannya sehingga bergerombol diatur dikawal supaya tidak berbahaya. Kenda-



Anggota Komisi V DPR, Saleh Husin

raan roda dua kan yang mengendarai saudara kita yang berpenghasilan rendah dan pengetahuan transportasinya juga rendah. Keselamatan mudik ini menjadi tanggungjawab Kemenhub dan Kepolisian,”jelasnya. (si)foto:si



Situasi kemacetan saat mudik hari raya Idul Fitri

Tidak Ada Alasan Kejagung dan Polri Tidak Bisa Berantas Korupsi

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, tidak ada alasan lagi bagi Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung untuk tidak berani bertindak tegas terhadap kasus-kasus korupsi saat ini yang sudah sangat kronis. Pasalnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan dengan tegas kepada penegak hukum untuk memberantas korupsi.

“SBY kan sudah bicara kepada kejaksaan agung dan kepolisian RI untuk menindak teas korupsi. Tidak ada alasan lagi bagi kedua institusi itu untuk tidak melaksanakan instruksi tersebut. Selama ini sudah cukup presiden disalahkan untuk merajalelanya korupsi. Tidak bisa presiden sendirian,

dia harus didukung semua pihak termasuk oleh jajaran dibawahnya itu,” ujar Marzuki dalam acara buka puasa bersama dengan Ikatan Sarjana NU dan juga wartawan koordinatorian DPR RI di rumah dinas di Jakarta, Kamis malam, (26/7).

Komitmen SBY untuk penegakan

hukum pun menurut Marzuki sudah jelas misalnya dengan menyetujui penambahan personil kepolisian sebanyak 20.000 orang. “SBY menyetujui penambahan personil kepolisian sebanyak 20.000 orang, ini saya lihat sebagai bentuk komitmen pemerintahan saat ini terhadap penegakan hukum. Tidak ada lagi alasan bagi kepolisian untuk tidak berkomitmen pada penegakan hukum,” tambahnya.

Terkait maraknya korupsi di lembaga yang dipimpinnya, Marzuki mengatakan bahwa korupsi saat ini sudah merajalela dari tingkat pusat sampai daerah, dan melibatkan semua institusi negara. Para pelaku korupsi menurutnya adalah orang yang sudah tidak percaya pada ajaran agama dan sudah tidak takut akan siksa api neraka. “Jadi bukan masalah misalnya kok Al Quran di korupsi. Orang yang korupsi itu sudah tidak takut dengan ajaran agama, tidak takut sama neraka., Orang yang sudah tidak takut sama neraka, apapun mereka kerjakan, termasuk mengkorupsi Al Quran. Korupsi Al Quran buat mereka jadi biasa saja,” imbuhnya.

Korupsi di DPR, tambahnya juga hanya bisa terjadi karena ada eksekutif yang mengajaknya. “DPR tidak akan bisa melakukan korupsi jika tidak diajak oleh eksekutif. Coba gimana caranya DPR melakukan korupsi sendirian? Yang mau kasih uang siapa? Kalau eksekutif tidak mengajak legislative tidak bisa berbuat apa-apa. Eksekutornya yang mengajak DPR. Jadi kalau diajak makanya ditolak saja,” imbunya.

Dirinya pun menjelaskan bahwa korupsi itu dimulai dari tingkat perencanaan. Kadang menurutnya level menteri pun bisa ditelikung, selain itu bisa juga dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). (si)foto:parle



Ketua DPR Marzuki Alie (kiri kedua) berbincang dengan Ali Masykur Musa (kanan) di rumah dinas Ketua DPR



Ketua DPR Marzuki Alie saat diwawancarai wartawan di rumah dinas

Ketua DPR Berbuka Puasa dengan Presiden SBY

Ketua DPR RI Marzuki Alie menjadi tuan rumah buka puasa bersama dengan Presiden SBY dan pimpinan lembaga negara lain.



Saat buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR RI Marzuki Alie

Kegiatan yang berlangsung setiap memasuki bulan suci Ramadhan ini diharapkan meningkatkan silaturahmi diantara pejabat negara sehingga dapat mendukung kinerja dalam berbuat untuk masyarakat.

“Kehadiran Bapak Ibu menambah tali silaturahmi diantara pimpinan negara tentu dalam upaya kita yang sama-sama bercita-cita membawa negara ini menjadi negara adil, aman, damai dan sejahtera,” kata Marzuki saat menyampaikan sambutannya di rumah dinas Ketua DPR, kompleks pejabat negara Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (25/7/12).

Presiden SBY hadir dalam acara tersebut didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, demikian pula Wakil Presiden didampingi Ibu Herawati Boediono. Sementara pejabat negara lain terlihat diantaranya Ketua MPR Taufik Kiemas, Ketua DPD Irman Gus-

man, Ketua BPK Hadi Purnomo, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia bersatu.

Acara Buka Puasa pejabat negara yang dimulai pukul 17.15 WIB tersebut berlangsung sederhana, pidato hanya disampaikan tuan rumah. Setelah itu KH. Ahmad Mustain Syafie, pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng menyampaikan hikmah Ramadhan berjudul Puasa itu Nikmat.

Setelah berbuka puasa para pejabat negara ini terlihat khusuk melaksanakan shalat Magrib berjamaah dipimpin wakil imam besar Masjid Istiqlal, KH. Syarifudin. Didampingi Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Marzuki menyapa para tamu yang hadir termasuk duta besar dari sejumlah negara sahabat.

Acara silaturahmi tersebut berakhir menjelang pukul 19.00 WIB. Ketua DPR didampingi istri Asmawati Marzu-



Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng, KH. Ahmad Mustain Syafie

ki kemudian mengantarkan Presiden menuju kendaraannya. “Assalamualaikum..,” sapa SBY sambil mengangakat tangannya saat melintas didepan wartawan baik cetak maupun elektronik yang meliput kegiatan tersebut. (iky)foto:wy/parle

Pembantaian Muslim Rohingya Bentuk Pelanggaran HAM Berat

Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, pembantaian muslim Rohingya yang dilakukan secara sistematis oleh Junta Militer Myanmar merupakan tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan dan dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat dan crime against humanity (kejahatan terhadap kemanusiaan) yang secara spesifik mengarah kepada genosida atau pemusnahan etnis.

“Indonesia sebagai negara yg menjunjung tinggi HAM, yang juga ketua ASEAN harus proaktif memberikan teguran yang keras kepada Myanmar dan mendesak negara itu untuk menghormati HAM dan menyelesaikan konflik etnis yang ada dengan memberikan hak hidup dan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya seperti warga lainnya,”ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (24/7).

Marzuki mengharapkan peran aktif PBB dalam merespons kasus Rohingya ini, baik dari sisi kemanusiaan, maupun politis. “Dari sisi kemanusiaan, yang harus diantisipasi adlh masalah pengungsi kemudian secara politis, PBB harus mendesak Myanmar agar menghormati HAM, karena bagaimanapun pembantaian dan pengusiran suku Rohingya sehingga mereka tak berke-warganegaraan adalah perilaku negara yang tidak beradab,”tegasnya.

Menurutnya, persoalan ini juga harus direspons oleh OKI. Artinya, harus



Ketua DPR Marzuki Alie

ada langkah konkret untuk melindungi suku Rohingya, sehingga tidak jadi sasaran etnis mayoritas dan junta militer. “OKI harus mendesak PBB agar memberikan sanksi tegas. Pemimpin Myanmar bisa diajukan ke International Criminal Court (ICC) dengan tuduhan upaya genosida secara sistematis

terhadap Suku Rohingya,”paparnya.

Kasus Rohingya, lanjut Marzuki, secara khusus merupakan ujian bagi solidaritas umat Islam yang sekarang tengah menjalankan ibadah Ramadan. Karena itu, Marilah kita berdoa dan mengulurkan tangan kepada Muslim Rohingya yang tengah tertimpa musibah atau cobaan itu, agar diberi ketabahan.

Terkait dengan ASEAN, tambahnya, Myanmar harus diingatkan komitmennya terhadap demokrasi, jadi bukan hanya secara prosedural dengan memperbolehkan oposisi Aung San Su Kyi untuk ikut pemilu saja, tetapi jauh lebih penting adalah demokrasi substansial yang terkait erat dengan HAM khususnya hak hidup etnis Rohingya.

“DPR, khususnya Komisi I proaktif merespons persoalan ini dan mendesak agar pemerintah/Indonesia dpt memainkan peran strategisnya khususnya melalui ASEAN, karena masalah ini sudah jadi masalah Asean dan Internasional,”paparnya. (si) foto:ry



Para pengungsi etnis muslim Rohingya di Myanmar

Kenaikan Gaji Hakim Muda Disambut Positif

Komisi III DPR RI menyambut baik hasil rapat koordinasi pemerintah, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera menaikkan gaji hakim muda atau nol tahun karir. Kenaikan tersebut walaupun belum mencapai nilai ideal tetapi dapat dimengerti, memperhatikan kondisi keuangan negara.

“Kenaikan itu kita sambut baik untuk menunjang para hakim muda kita agar dapat bekerja optimal. Nilai Rp.10 sampai 11 juta itu sebenarnya masih kurang, idealnya Rp.15 sampai 18 juta, tapi sudah ada perbaikanlah memperhatikan kondisi keuangan negara juga,” kata anggota Komisi III dari FPPP Dimiyati Natakusumah di Jakarta, Jumat (27/7/12)

Baginya penghasilan hakim mendukung kinerja dalam memimpin persidangan dan memperjuangkan lembaga peradilan yang berwibawa, transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Pada akhirnya kekuasaan kehakiman yang berkeadilan akan bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, karena publik terbantu dengan keputusan hakim yang adil.

“Kita di DPR akan terus mengawal proses ini, harapannya kenaikan ini berkala setiap tahunnya sampai gaji minimal hakim pemula mendekati angka ideal,” lanjut anggota legislatif yang menyelesaikan studi doktoralnya dengan tesis tentang Realizing Justice Reform.

Bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari FPDIP Herman Herry mengatakan perhatian terhadap kesejahteraan para hakim muda hendaknya sejalan dengan peningkatan kinerja. Ini juga pernah disampaikan saat menerima aspirasi perwakilan hakim muda dari seluruh Indonesia di DPR beberapa waktu lalu.

“Hakim muda ini harapan kita jangan sampai terkontaminasi kasus, makelar kasus, dan lain-lain. Mereka harus paham bahwa putusannya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan atas nama Tuhan,” tandasnya.

Seperti diketahui perwakilan hakim muda dari seluruh Indonesia beberapa waktu lalu menyampaikan aspirasi



Anggota Komisi III DPR, Dimiyati Natakusumah penghasilan para hakim muda dengan masa kerja 0 tahun minimal Rp10,6 - 11 juta. Selain gaji, disepakati perubahan status hakim dari pegawai negeri sipil biasa menjadi pejabat negara.

Sebagai pejabat negara, hakim nantinya akan mendapatkan tunjangan sesuai ketentuan, antara lain tunjangan kendaraan, tunjangan kemahalan berdasarkan zona, jatah pensiun, dan tunjangan perumahan. Besaran gaji yang akan diterima oleh masing-masing hakim juga akan sesuai dengan tiga ketentuan, yaitu jenjang karir, wilayah, dan kelas pengadilan. (iky) foto:parle

kepada pihak-pihak terkait di Jakarta termasuk DPR. Mereka menyuarakan hakim adalah pejabat negara yang mempunyai hak-hak melekat sesuai UU no. 48/2009 tentang Kekuasaan Hakim. Untuk itu remunerasi bagi hakim perlu ditinjau ulang dan diganti dengan gaji dan tunjangan serta hak-hak lain yang melekat pada seorang pejabat negara.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Setneg dan MenPAN bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah menggelar rapat membicarakan tuntutan tersebut. Keputusan yang berhasil dibuat adalah menaikkan

Ketua DPR Lantik PAW Syofyan Ali

Ketua DPR Marzuki Alie melantik Anggota Pergantian Antar Waktu (PAW) Syofyan Ali menggantikan As'ad Syam dari Partai Demokrat.

Sebelum pelantikannya, Syofyan Ali mengatakan, dirinya akan terus berjuang menjalankan fungsi Dewan seperti dibidang Pengawasan, Legislasi, anggaran. "Itu yang paling utama akan diperjuangkan," ujarnya di Gedung Operation Room, Selasa, (24/7).

Menurutnya, dirinya siap ditempatkan pada Komisi apa saja. "Semuanya

tergantung pimpinan mau ditempatkan dimana saja," ujar Mantan Bupati Bungo periode 1996-2001.

Diminta tanggapannya soal maraknya korupsi yang melibatkan anggota Dewan, Dia mengatakan, persoalan korupsi tidak bisa digeneralisir bahwa DPR merupakan sarang koruptor ini merupakan perbuatan oknum anggota semata. "Ini tidak bisa kita sa-

makan, karena itu sebagai anggota Dewan kita harus bekerja untuk rakyat khususnya di bidang dan fungsi DPR di pengawasan, legislasi, anggaran," paparnya.

Berdasarkan keputusan Badan Kehormatan (BK) As'ad Syam dinonaktifkan dari Komisi VIII DPR RI setelah terlibat kasus korupsi proyek PLTD Unit 22, Kecamatan Sungaibahar, akibat perbuatannya tersebut merugikan negara Rp 4 Miliar itu, Asad Syam menjalani sanksi empat tahun penjara di Lapas Jambi. As'ad Syam ditangkap oleh tim gabungan dari Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediamannya di Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Berdasarkan data rekapitulasi penghitungan perolehan suara saat Pemilu 2009 lalu, Syofyan Ali menduduki peringkat ketiga di bawah Indrawati dan As'ad Syam. Syofyan Ali meraih 18.568 suara dan keempat ditempati oleh Suparman yang mengumpulkan 18.393 suara. berdasarkan aturan KPU Syofyan Ali menggantikan As'ad Syam sebagai anggota DPR RI. (si)/foto:iwan armanias/parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik Anggota PAW Syofyan Ali

Myanmar Harus Akui Muslim Rohingya

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menegaskan, Pemerintah Myanmar harus membuka kebijakan politik dan mengakui serta menerima muslim Rohingya sebagai bagian dari muslim arakan dan sebagai warga negara Myanmar.

“Melalui cara itu, segala perlakuan diskriminatif akan diakhiri dan saya sangat yakin muslim Rohingya itu bisa beradaptasi dengan masyarakat sekitar, karena telah ada puluhan tahun,”ujarnya kepada Parlemen, Kamis, (27/7).

Menurut Mahfudz, isu muslim Rohingya ini telah dicitusnya di berbagai forum internasional seperti PBB, OKI, dan UNHCR. “Ini tidak bisa kita biarkan mereka menjadi Komunitas yang stateless, karena bangladeshpun tidak

mau menerima mereka, Myanmar pun tidak mengakui mereka,”terangnya.

Dia menambahkan, Indonesia sangat berharap dengan kehadiran sosok Aung San Suu Kyi yang dapat menjadi simbol pejuang demokrasi di Myanmar. “Kita juga akan amat menyayangkan apabila dia masih mengembangkan pandangan bahwa muslim Rohingya bukan bagian dari masyarakat Myanmar,”ujarnya.

Dia mengatakan, kebijakan politik yang harus dilakukan Myanmar yaitu

segera menerima dan mengakui dulu mereka sebagai warga negara. Setelah itu baru berbicara mengenai hak-hak mereka sebagai minoritas.

“Minoritas ini bukan hanya muslim-Rohingya, muslim di arakan juga minoritas, mereka tidak boleh mendapatkan diskriminatif,”tambahnya. Walaupun nantinya, jika ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perlakuan terhadap minoritas jaminannya adalah tidak spesifik hanya muslim Rohingya. (si)

Pemerintah Harus Segera Merespons Soal Kelangkaan Kedelai

Ketua DPR Marzuki Alie menilai, pembebasan sementara bea masuk untuk kedelai sebesar 5 persen merupakan langkah yang tepat untuk melindungi industri kedelai saat ini. “Kekacauan ini dimulai karena adanya gagal panen di Amerika Serikat sedangkan permintaan Cina terhadap kedelai sangat besar,” papar Marzuki Alie, di Kediannya Widya Chandra, Jakarta, Kamis, (27/7).

Menurut Marzuki, dengan pembebasan bea masuk diharapkan harga kedelai dapat turun dipasaran, dan setelah stabil baru bea masuk dapat ditetapkan kembali. “Ini untuk mengamankan dan melindungi kedelai di pasaran, sebenarnya apabila tidak impor, petani tentu diuntungkan namun dengan catatan tidak dijual ke tengkulak,” paparnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus segera merespons kelangkaan kedelai ini sehingga tidak terjadi kelangkaan produk tahu dan tempe di pasaran. “Yang penting kecepatan respons apabila tidak berhasil harus dievaluasi segera,” katanya.

Dipasaran saat ini tempe ukuran sedang tadinya Rp 2.000, sekarang naik jadi Rp3.500. Selain itu, harga satuan tahu ukuran kecil biasanya dijual Rp250 naik menjadi Rp400. Sedangkan tahu ukuran sedang semula Rp400 naik menjadi Rp700 untuk harga satuannya.

Sementara Anggota Komisi IV DPR Ma'mur Hasanuddin menilai, langkah membebaskan bea masuk kedelai nol persen sampai akhir tahun dan memfasilitasi koperasi para pengrajin tahu dan tempe untuk mengimpor langsung ke negara penghasil menunjukkan skema kebijakan pangan reaktif dan grand desain tata niaga pertanian yang buruk dari Pemerintah. “Kebijakan tersebut hanya mampu meredam gejolak kedelai dalam jangka pendek, namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kedelai dalam jangka panjang,” ujarnya.

Menurutnya, Pembebasan bea masuk hanya menguntungkan importir, sama sekali tidak memberikan keuntungan bagi petani lokal. Selama pemerintah tidak menyelesaikan masalah penambahan lahan pertanian



Ketua DPR RI Marzuki Alie saat diwawancarai wartawan soal kelangkaan kedelai

dan insentif bagi petani kedelai dalam mendorong peningkatan produksi, maka importasi akan terus terjadi.

Situasi saat ini, lanjutnya, semakin menegaskan bahwa impor tidak dapat dijadikan penopang utama dalam pemenuhan komoditas pangan nasional, kejadian kelangkaan seperti ini seringkali terjadi seperti kentang dan cabai. Di sisi lain memberikan gambaran jelas bahwa Pemerintah sesungguhnya tidak pernah serius dalam mendorong swasembada kedelai dan sektor pertanian secara umum.

Legislator dari Kabupaten Bandung dan Bandung Barat ini menjelaskan, Produksi kedelai lokal selama ini bagus sebenarnya, namun petani tidak pernah mendapatkan manfaat dari capaian tersebut. Hal ini terjadi karena tata niaga yang buruk dari Pemerintah

menyebabkan kedelai lokal lebih mahal dibandingkan kedelai impor.

Kementerian Pertanian menyatakan bahwa swasembada kedelai terkendala lahan yang terbatas. Luas lahan kedelai di tanah air hanya 600 ribu hektare dari luas ideal yang dibutuhkan 1,5 hektare dengan produksi 1,5 ton hektare. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyatakan ada lahan telantar 7,3 juta hektare yang dapat dialokasikan untuk tanaman pangan, tetapi selama 2 tahun ini belum mulai direalisasikan. Begitupun dengan Kementerian Kehutanan yang menjanjikan sekitar 2 juta Ha lahan yang bisa ditanami, namun juga belum terealisasi. “Menko harus mendorong BPN dan Kementerian Kehutanan menuntaskan janjinya yang akan memberikan alokasi lahan untuk pengembangan pertanian.

Lahan yang ada saat ini tidak mungkin dipaksakan untuk produksi yang besar jika tidak ada terobosan ekstensifikasi dan reformasi agraria yang berpihak” tegas Ma'mur.

Ma'mur juga menyesalkan langkah sweeping oleh sekelompok pihak kepada pedagang yang masih berjualan tahu dan tempe sebagai bentuk solidaritas. Pihak berwenang seharusnya mampu mengantisipasi hal tersebut, karena tindakan pelarangan berniaga

dengan mamaksakan kehendak tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun.

“Kegiatan sweeping yang dilakukan kontraproduktif dengan semangat yang solidaritas yang dimaksud, oleh karenanya pihak berwenang harus mencegah perilaku tersebut berlangsung terus. Dalam situasi sekarang ini sesungguhnya pihak yang paling dirugikan adalah konsumen, karena mereka dalam situasi ketidakpastian harga

dan komoditas kedelai”

Disepakati Gabungan Koperasi Pengrajin Tahu-Tempe Indonesia bahwa pengrajin tempe dan tahu di semua wilayah DKI Jakarta serta sebagian Jawa melaksanakan mogok produksi dan berjualan selama 3 hari yaitu 25-27 Juli 2012. Perajin tempe-tahu melakukan sweeping ke pasar-pasar dan sentra-sentra produksi sebagai bagian dari aksi mogok produksi. (si) foto:wy

Komisi I DPR Terima Dubes Turki

Ketua Komisi I DPR menerima kunjungan kehormatan Dubes Turki untuk Indonesia. Kunjungan tersebut dalam rangka mempersiapkan rencana Kunjungan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia.



Ketua Komisi I Mahfud Siddiq (kanan) saat menerima kunjungan Dubes Turki (kiri) untuk Indonesia di Gedung Nusantara II DPR

“Awalnya mereka akan berkunjung pada tahun 2014 namun dipercepat guna mempertimbangkan agenda Pemilu di Indonesia dan di Turki, akhirnya direncanakan tahun 2012,” ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Gedung Nusantara II DPR, Kamis, (26/7).

Menurut Mahfudz, Turki merupakan negara muslim terbesar di Barat. Sementara Indonesia negara muslim terbesar di Timur karena itu, secara historis hubungan Indonesia dan Turki sudah berlangsung selama ratusan tahun. Jadi kunjungan PM Turki ini mempunyai peranan penting mengupdate hubungan bilateral kedua negara khu-

susnya bidang pertahanan karena antara kedua negara sudah ada MOU kerjasama pertahanan dan militer di dua level tingkat Presiden dan Menteri.

“Implementasi dan realisasi yang mereka rasakan berjalan lambat, sementara pihak Turki sendiri sangat terbuka dan ingin kerjasama pertahanan militer dan industri pertahanan ini bisa segera berjalan,” ujarnya.

Dia menambahkan, Parlemen Indonesia mencoba memberikan informasi atau gambaran lebih detailnya guna mempercepat realisasi dan implementasi dari MOU tersebut. “Kita Beberapa kali rapat dengan Menhan pernah menyampaikan perlunya merealisasikan

kerjasama dengan Turki, termasuk kerjasama dalam pengadaan Alutsista. Karena secara industri Turki ini sudah maju dan Produknya berstandar NATO,” tambahnya.

Dia mengatakan, Saat kunker Komisi I DPR ke Turki dan menemui menteri Pertahanan Turki dan Industri pertahanan Turki, mereka menyatakan komitmennya untuk mengembangkan industrinya di Indonesia, termasuk kerjasama dengan industri pertahanan nasional Indonesia. “Akan sangat menguntungkan bagi Indonesia, karena itu kita perlu dorongan lebih kuat pada pihak Indonesia,” ujarnya. (si/as)/foto: iwan armanias/parle.

Komisi VII DPR Dukung PT. Arun Jadi Buffer stock gas Nasional

Komisi VII DPR mendukung PT. Arun menjadi Buffer stock (Stok penyangga) gas nasional untuk kebutuhan gas di dalam negeri.

“Komisi VII DPR menginginkan PT. Arun menjadi buffer stock nasional kalau gas lain bisa kita cari dari dalam negeri dan luar negeri. yang penting tugas pemerintah itu menjamin keberadaan gas nasional,” ujar Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana kepada wartawan saat Kunjungan ke Aceh meninjau kebutuhan gas PT. Arun baru-baru ini.

Menurutnya, langkah ini bisa menghemat sampai Rp. 180 Miliar daripada kita membangun storage di daerah lain. “ini sangat luar biasa tujuan kita yang utama untuk melihat potensi penghematan Negara, bahkan PT. Arun dan Pertamina sudah mempersiapkan diri, kita harapkan segera mungkin dapat tercapai dan lebih cepat,”ujarnya.

Dia mengatakan, terdapat storage yang menganggur di PT. Arun yang dapat dimanfaatkan oleh Pertamina daripada harus menyewa floating storage di kapal-kapal. Hal itu terbukti dapat sampai 180 miliar per bulan. “Kita ingin memberdayakan PT. Arun seperti semula, kalau PT. Arun cq Pertamina dapat mengalirkan gasnya ke Medan tentunya akan

semakin berkembang seperti dahulu. Kita ini berusaha menyelesaikan masalah (problem solver) kalau dengan ikhlas dan yakin tentunya 60 persen akan selesai. target Kepresnya tentu secepatnya,”paparnya.

Dia menambahkan, tujuan ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat Lhoksumawe atau Aceh dan umumnya Indonesia. “kita tinggal meramu saja ini kemauan PT. Arun, Pemerintah Daerah dan mengalihfungsikan yang akan dibangun di Medan di Aceh yang

penting ada pergantian bagi warga yang terkena pembangunan pipanya nanti,”tambahnya.

Sutan menegaskan, Komisi VII DPR akan segera memanggil dan mengundang jajaran Direksi PT. Arun Pertamina, BP Migas, untuk membahas persoalan gas ini. “Saat masa sidang nanti kita akan undang semuanya seperti PT. Arun, PT PIM, BP Migas, Pertamina untuk membahas persoalan ini,”tambahnya. (si) foto: si/parle



Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana (pojok kiri) menyalami Direksi PT Arun (kanan)



Panja Madrasah, Bentuk Perhatian Bagi Lembaga Pendidikan Islam

Undang-undang tentang Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 menempatkan pendidikan dalam kesatuan, dengan tidak membedakan pendidikan umum dengan agama atau pendidikan yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Agama (Kemenag). Namun faktanya, lembaga pendidikan di bawah Kemenag kurang mendapatkan perlakuan yang setara dengan pendidikan-pendidikan yang dikelola oleh Kemendikbud.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairun Nisa saat mengunjungi Lembaga Pendidikan Islam Muslimat NU Palangkaraya, Selasa, (17/7).

“Ini antara lain disebabkan bahwa di bawah Kemenag itu 90% madrasah itu swasta, sehingga madrasah-madrasah

ini perlu kita tinjau supaya mendapat perhatian lebih dari kementerian” ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR Chairun Nisa.

Chairun Nisa mengatakan, kunjungan ke Madrasah ini bertujuan menyerap aspirasi dari komunitas Madrasah terkait telah dibentuknya panja Madrasah yang merupakan motor penggerak untuk memperjuangkan dan mengawal aspirasi seputar Madrasah agar bisa terealisasi.

Pada kesempatan itu, Ketua Yayasan Muslimat NU Ratna Banani menyampaikan kondisi kurangnya ruang kelas di lembaga yang dia pimpin, padahal antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah cukup tinggi.

“Kurangnya buku-buku di perpustakaan madrasah juga menjadi kendala bagi Muslimat NU. Lembaga pendidikan Islam Muslimat NU ini terdiri dari RA, MI, Mts dan MA dalam satu

atap. Saat ini yayasan ini memiliki 960 siswa, dengan tenaga pendidik berjumlah 80 orang yang terdiri dari guru PNS dan non PNS,”ujarnya.

Menurutnya, Muslimat NU masih mengandalkan bantuan dari Kanwil Kemenag Kalteng bahkan ada pula bantuan dari swadaya masyarakat. Selain itu Raudatul Athfal (RA) menyampaikan permohonan bantuan media pembelajaran karena alat peraga di RA Muslimat NU masih kurang memadai.

Menanggapi aspirasi tersebut, Chairun Nisa menjelaskan, Komisi VIII memang memiliki fungsi anggaran namun tidak terperinci dan pembahasannya dilakukan bersama Kemenag. Karena anggarannya ada pada Kemenag maka Komisi VIII hanya bisa mendorong Direktorat Pendidikan Islam Kemenag untuk menyalurkan bantuan.

“Silahkan Kepala Madrasah untuk mengajukan proposal, secepatnya, namun jangan lupa untuk menyertakan rekomendasi dari bidang Mapendais..” jelas Chairun Nisa

Fungsi lainnya, jelasnya, Komisi VIII juga memiliki fungsi pengawasan dengan melakukan monitoring program-program Kemenag. Salah satunya adalah permasalahan honor guru swasta yang kini sudah ditetapkan minimal 250 ribu rupiah per bulan.

“Saat ini masih terdapat guru honor yang di gaji 150 ribu rupiah per bulan. Mengingat porsi anggaran pendidikan di Kemenag yang mencapai 75% dan 90% Madrasah di bawah Kemenag adalah Madrasah swasta. Salah satu tugas panja madrasah adalah memperjuangkan gaji guru honor,”paparnya. (ray) foto:ray



Wakil Ketua komisi VIII DPR, Chairun Nisa



Tim Kunjungan Kerja komisi VIII DPR saat meninjau Madrasah Muslimat NU Palangkaraya

Pemerintah Diminta Lakukan Kontrol RSBI

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diminta melakukan kontrol terhadap pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, utamanya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan khususnya dalam pelaksanaan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Dalam PP tersebut salah satunya mengatakan setiap kabupaten/kota dapat mendirikan satu sekolah unggulan. Namun yang dimaksud RSBI di sini adalah menyeleksi guru terbaik di kabupaten/kota tersebut untuk mengajar di sekolah RSBI itu, Kepala Sekolahnya juga hasil seleksi terbaik dan siswa yang masuk pun merupakan hasil seleksi siswa dengan pilihan terbaik.

Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Dedi Suwandi Gumelar saat pertemuan dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Rabu (18/7), yang dipimpin Ketua Komisi X Agus Hermanto,

Menurut Dedi, persepsi orang tentang RSBI sekarang sudah berubah. RSBI sekarang dapat menarik dana dari masyarakat tidak memiliki batas maksimal. Sehingga yang muncul sekarang adalah RSBI bertarif internasional. "Di sini muncullah diskriminasi yang melanggar UUD 1945," katanya.

Dedi menambahkan, padahal RSBI ini mendapatkan alokasi dana dari APBN lebih banyak dibandingkan sekolah regular. Ini tentunya dapat menimbulkan kecemburuan bagi sekolah-sekolah lain yang bukan RSBI.

RSBI ini, kata Dedi, dalam kenyataannya juga tidak sepenuhnya betul-betul dapat disebut sebagai sekolah unggulan. Terbukti lulusan-lulusan terbaik SMA malahan dari sekolah biasa, bukan dari RSBI.

Dalam hal ini, Gubernur memiliki kewenangan di otonomi dan seyogyanya dari daerah muncul keinginan untuk menertibkan RSBI-RSBI yang semakin lama semakin banyak jumlahnya.

Sementara Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto menambahkan, memang sebaiknya peningkatan sekolah



Tim Komisi X DPR saat melakukan peninjauan ke SMU 1 Ungaran



Anggota Komisi X DPR Dedi Suwandi Gumelar meninjau langsung kegiatan salah satu SMK di Ungaran

biasa menjadi RSBI distop dulu.

Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi keberadaan RSBI dan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan RSBI menjadi SBI (Sekolah Bertaraf Internasional).

Harus diakui, RSBI ini memang belum sepenuhnya berhasil, karena ter-

bukti belum menjadi SBI yang betul-betul bisa diunggulkan.

Hal inilah yang menurutnya perlu dilakukan evaluasi, sehingga sekolah-sekolah biasa yang mengajukan peningkatan menjadi RSBI sebaiknya distop dulu. (tt) foto:tt

UU PT : Tidak Satupun Pasal Bertentangan Dengan UUD 1945

Ketua Komisi X DPR RI Agus Hermanto mengatakan, tidak satu pun pasal dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi (PT) yang bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto (kanan) saat bersama Rektor Unnes (kiri)

“Saya sudah membaca pasal demi pasal sebelum disahkan dalam Sidang Paripurna DPR, dan tidak ada satu pun pasal yang bertentangan,” kata Agus menjawab pertanyaan wartawan usai pertemuan dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Rabu (18/7) di Kantor Gubernur Jateng.

Agus mengatakan, UU PT yang baru saja disahkan DPR RI pada Jum'at (13/7) memang masih banyak pro dan kontra. Namun UU ini harus disahkan dan harus ada. Karena jika UU ini tidak ada, justru akan memberi peluang keluarnya Peraturan Menteri (Permen) yang terus menerus, yang tentunya Permen ini bisa lebih memberatkan Rektorata mahasiswa.

Jika UU ini masih ada kekurangan, kata Agus, bisa disesuaikan karena se-

tiap UU itu pelaksanaannya ada PP nya, dan itu yang bisa kita selaraskan karena PP sifatnya lebih fleksible.

Namun jika ada orang yang mengajukan uji materi, tentunya hak setiap orang boleh mengajukan.

UU ini, kata Agus, justru memberikan peluang kepada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lebih mendapatkan perhatian dari pemerintah. Terbukti, untuk penelitian dan pengembangan PTS pun diberikan anggaran, untuk itu tentunya PTS harus mengikuti aturan-aturan untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Dan untuk penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sekarang gratis apabila dilakukan oleh pemerintah. UU ini juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi untuk tetap dapat melanjutkan sekolah.

Sekarang ini dibuka seluas-luasnya bahkan ada bantuan-bantuan sekolah, bea siswa, dan bantuan-bantuan lain. Jika dulu bantuan itu diberikan kepada siswa yang mempunyai akademi tinggi, sekarang mahasiswa yang kurang mampu dalam arti juga kemampuannya pas-pasan dapat diberikan pinjaman dahulu, dimana pinjaman tersebut dapat dikembalikan setelah mahasiswa tersebut lulus dan bekerja. “Jadi UU ini memberikan kesempatan lebih besar kepada PTS,” kata Agus.

Selain itu, PTS juga diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi yang lain untuk meningkatkan kemampuan daripada pendidikan tersebut.

Perdebatan seputar Pasal-pasal UU Pendidikan Tinggi diantaranya tentang organisasi PT. Dimana bunyi Pasal 61 ayat 3 mengatakan, organisasi penyelenggara perguruan tinggi diatur dalam statuta perguruan tinggi dan Pasal 66 berbunyi statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu masalah kurikulum, dimana Program Studi diselenggarakan atas ijin menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. Pasal 33 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai metode, pemberian dan pencabutan ijin program studi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal lain yang diperdebatkan adalah mutasi dosen. Pasal 65 ayat 3 berbunyi PTN Badan Hukum memiliki wewenang mengangkat dan menghentikan dosen dan tenaga kependidikan. Pasal 70 ayat 6 berbunyi ketentuan mengenai penugasan dosen dan pemberian insentif kepada dosen diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam Pasal ini substansi penolakan dikarenakan Mendikbud khawatir akan sewenang-wenang mutasi dosen yang dinilai vokal. (tt)foto:tt

Wartawan DPR Buka Puasa Bersama Ketua DPR

Setelah menjadi sohibul bait atau tuan rumah acara buka puasa bersama dengan Presiden dan Lembaga negara, kembali Ketua DPR RI Marzuki Alie menjadi Sohibul Bait dengan kalangan Kordinatoriat wartawan Press Room DPR RI, dan Pengurus Ikatan Sarjana NU (ISNU) yang diwakili oleh Ali Masykur Musa.



Koordinatoriat Wartawan DPR saat buka puasa bersama di rumah dinas Ketua DPR Marzuki Alie

dulu kala. “Bahkan Profesor dan Doktor sudah banyak sekali karena itu perlu diwadahi,”ujarnya.

Menurutnya, NU telah mendapatkan izin untuk pembangunan 10 universitas diberbagai wilayah. “Yang sudah resmi itu di Cirebon, dan Jawa Timur sementara yang delapan akan segera di proses,”paparnya.

Dia menambahkan, kehadiran Universitas NU tidak berniat untuk menyaingi Universitas yang sudah ada seperti IAIN. “Ini merupakan universitas swasta dan kita harapkan juga tidka kalah dengan Universitas lainnya,”tambahnya. (si) foto:wy

A cara yang berlangsung meriah tersebut, juga dihadiri oleh Ketua MK Mahfudz MD, Pembina ISNU Prof. Mubarak, dan kerabat Ketua DPR lainnya. acara dimulai dengan pembacaan alfatihah oleh Ali Masykur Musa, yang juga mantan Anggota DPR ini.

Berikutnya kultum oleh Syeh Muhammad Ali Jaber. Didalam khotbahnya, Jaber menghimbau agar umat muslim mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, seperti nikmat kehidupan dan silaturahmi. “Orang mukmin harus memanfaatkan semaksimal mungkin ramadhan yang ada untuk beramal saleh, karena itu ada salah mohon diampuni, mari jalankan amal soleh, tidak ada yang tahu kita akan hidup untuk hari esok,”himbauanya di Kediaman Ketua DPR Widya Chandra, Kamis malam, (27/7).

Seusai berbuka puasa, Ali Masykur Musa mengatakan, NU berencana membangun universitas, karena saat ini keilmuan para kader NU itu sudah berbeda dibandingkan



Ketua DPR Marzuki Alie dan Mahfud MD beserta Syeh Muhammad Ali Jaber saat buka puasa bersama



Segenap Pimpinan DPR RI dan
Staf Karyawan Setjen DPR RI mengucapkan

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1433 H